



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



RENCANA KERJA (RENJA) 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

JL SETIABUDI NOMOR 1 TEMANGGUNG
Telepon (0293) 491048 Faximili (0293) 491313
Email: Kesbangpoltemanggung672@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
BAB V PENUTUP	67

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2024 sampai tahun 2026.

Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 1 Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19721126 199203 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

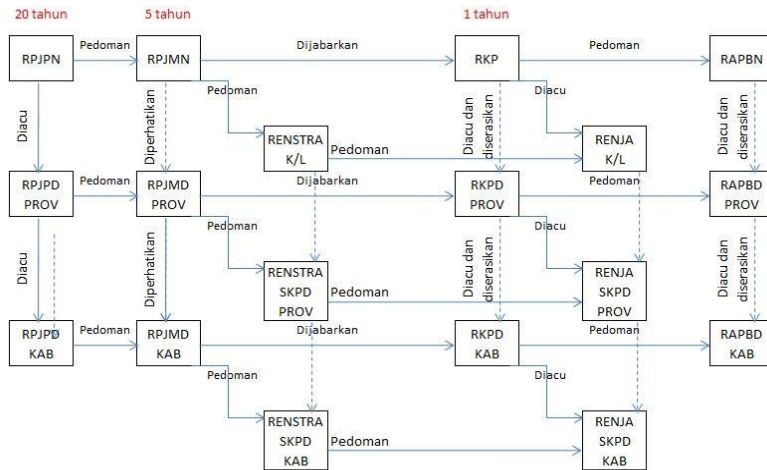
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau

tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun kelima pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Commented [11]: sistematika

Commented [12]: Template : Bab 2.1 Evaluasi Tahun 2023 dan Capaian Renstra tahun 2018-2023 coba dicek lagi sistematikanya

Commented [13]: Coba lihat tempate

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23
01.02	PRGOGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						48.381.100	555.000.000		550.147.000		99,13
		Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62		62			70,00		100	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	10		10			16,61		100	
01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen			2	48.381.100		0	0	0	0,00
8.1.2.201.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang			90		555.000.000	100	550.147.000	100	99,13
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					100	1.736.687.850	18.731.657.850	0	18.680.621.705	0	99,73
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87,00		87			87,21		100	
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30,00		30			32,73		100	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30,00		30			33,33		100	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen			5	1.736.687.850	18.731.657.850	5	18.680.621.705	100,00	99,73
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN						100.000.000	215.000.000		15.000.000		6,98

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%		100			100			100	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan		11	100.000.000	215.000.000	10	15.000.000	90,91	6,98	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					836.597.640	300.000.000		292.899.700		97,63	
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100		100		100		100		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		300	836.597.640	300.000.000	300	292.899.700	100,00	97,63	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.135.000.000	560.000.000		559.989.200		100,00	
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100		100		100		100		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%			10		16,61		100		
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%			35		70		100		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang		100	1.125.000.000	550.000.000	100	549.989.500	100,00	100,00	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan		12	10.000.000	10.000.000	12	9.999.700	100,00	100,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)			100	730.865.000	483.351.900	75	473.484.226	100	97,96	

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		100	327.000.000	175.000.000	100	170.979.990	100,00	97,70
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		12	2.500.000	2.500.000	12	2.499.060	100,00	99,96
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		12	7.000.000	7.000.000	12	6.999.000	100,00	99,99
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		12	6.750.000	6.750.000	12	6.728.900	100,00	99,69
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		12	12.000.000	12.000.000	12	11.866.800	100,00	98,89
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		12	29.979.000	31.767.000	12	31.695.669	100,00	99,78
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	20.000.000	17.200.000	12	16.012.713	100,00	93,10
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan		12	5.000.000	5.000.000	12	4.922.000	100,00	98,44
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12	133.636.000	158.136.000	12	154.693.214	100,00	97,82
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		15	32.000.000	38.000.000	12	37.249.670	80,00	98,03
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		4	150.000.000	24.998.900	4	24.844.410	100,00	99,38
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		11	5.000.000	5.000.000	11	4.992.800	100,00	99,86

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		K	Rp	K	Rp
									K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.02	PRGGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						48.381.100	415.000.000						
		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%			100				2.922.000		2.922.000		0,70
									92,86		92,86		92,86	
01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen			2	48.381.100							
									0	0	0	0	0	0,00
8.1.2.201.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang			90		415.000.000						
									15	2.922.000	15	2.922.000	16,67	0,70
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					100	0	30.460.469.000						
		Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%			100				38.385.500	0	38.385.500	0	0,13
									10,00		10,00		10	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen			12		30.460.469.000						
									3	38.385.500	3	38.385.500	25,00	0,13

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Commented [14]: Renstra 2018-2023

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks Gotong-Royong, Diukur dengan 2 variabel pada Kesbangpol yaitu Kepercayaan Sosial, dan Aksi Bersama;
 - b. Indeks Toleransi, Diukur dengan 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
 - b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
 - c. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
 - e. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
 - f. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - g. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
 - h. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
 - i. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - j. Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah
 - e. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - k. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
 - l. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:

NIHIL

6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:

NIHIL

7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:

a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran sub kegiatan tersebut adalah :

1. Terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari ormas calon penerima hibah.
2. Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki tidak sesuai target karena kondisi fisik kendaraan telah rusak berat

Implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja sub kegiatan adalah:

1. Anggaran untuk hibah tidak dapat direalisasikan dan menjadi SILPA perangkat daerah,
2. Anggaran dipergunakan untuk perbaikan kendaraan dinas lainnya.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Memastikan kesiapan dan kelengkapan administrasi calon penerima hibah
2. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih matang

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indeks Gotong-Royong
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Indeks Toleransi
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
4. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
5. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
6. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
7. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
8. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
9. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
10. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
11. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
12. Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I Tahun 2024 (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
	Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,5	4,51	4,52				0			
1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	n.a	100	100	100	100,00			100	T		
		Jumlah Konflik yang tertangani			0								
		Jumlah Konflik keseluruhan			0								
1	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	n.a	80	90	100	92,86			100,000	T		
		Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan			325								
		Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan			350								
2	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	80	90	100	10,00			12,5			UK
		Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan			1								
		jumlah pendidikan politik yang direncanakan			10								
3	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	13,33	16,67	20	4,20			31,48		AT	
		Jumlah ormas yang mendapatkan pembinaan			6								
		Jumlah ormas keseluruhan			143								
4	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	100	100	100	0,00			0			UK
		Jumlah penghayat aliran kepercayaan yang mendapatkan pembinaan			0								
		Jumlah seluruh aliran penghayat kepercayaan			8								
5	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	100	100	100	100,00			100	T		
		Jumlah konflik yang tertangani			0								
		Jumlah keseluruhan konflik			0								

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status tercapai ada 3 terdiri dari:
 - a. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kejadian tidak terduga yang tidak dapat diprediksi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjaga kondusivitas wilayah
 - b. Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung dalam penyampaian wawasan kebangsaan kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengaruh negatif globalisasi menggerus rasa nasionalisme
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan penguatan penyampaian wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila kepada masyarakat
 - c. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terbina sinergitas yang baik dalam mencegah dan menangani konflik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kejadian tidak terduga yang tidak dapat diprediksi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjaga kondusivitas wilayah
3. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Antusiasme yang baik dari organisasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah banyak ormas yang belum terdaftar

Commented [15]: Belum diisi

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan pemberdayaan ormas yang berkelanjutan
- 4) Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari :
 - a. Persentase pelaksanaan pendidikan politik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah di triwulan I 2024 fokus kegiatan pada kegiatan pemilu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penguatan penyampaian pendidikan politik
 - b. Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Antusiasme yang baik dari kelompok penghayat untuk mengikuti kegiatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perencanaan pelaksanaan kegiatan di TW III/IV
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah membina toleransi, kerukunan antar umat beragama

4.1.1 Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat dan Data Pokok Bidang Kesatuan Bangsa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Toleransi

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Indeks Toleransi Tahun 2018 s.d 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	Na	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19
Realisasi	Na	0,828	4	4,5	4,5	4,5

2. Indeks Gotong Royong

Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Indeks Gotong Royong Tahun 2018 s.d 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	Na	3,15	0,64	4,21	4,21	4,22
Realisasi	Na	4,15	0,83	4,33	4,33	4,33

Faktor pendukung tercapainya indeks gotong royong adalah budaya masyarakat Temanggung yang masih kental dengan tolong menolong dan percaya terhadap sesama. Upaya Badan Kesbangpol dalam menjaga budaya gotong royong adalah dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga budaya gotong royong di masyarakat seperti bakti sosial.

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Bankesbangpol dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi muda yang masih berada di bangku sekolah. Jenjang sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung.

Adapun untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

**Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
Tahun 2018-Triwulan IV 2023**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	52	56

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	65	70

Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 pada 56 sekolah di Kabupaten Temanggung dengan daftar sekolah sbb:

1.	SMA Bhakti Karya Kaloran	29	SMK Muh 1 Temanggung
2.	SMA Harapan Bangsa Kaloran	30	SMK Mutiara Mandiri Tmg
3	SMA Islam Kandangan	31	SMK NU Temanggung
4	SMA Islam Sudirman	32	SMK N 1 Temanggung
5	SMA IT Istiqomah Tembarak	33	SMK N 2 Temanggung
6	SMA Kristen Shekinah Temanggung	34	SMK N Bansari
7	SMA Miftakhul Muhtadin Montessori Kaloran	35	SMK N Jumo
8	SMA Muhammadiyah 1 Tmg	36	SMK N Pringsurat
9	SMA N 1 Candiroto	37	SMK N Tembarak
10	SMA N 1 Parakan	38	SMK PGRI Kedu
11	SMA N 1 Pringsurat	39	SMK Swadaya
12	SMA N 1 Temanggung	40	MA Al Maliki Temanggung
13	SMA N 2 Temanggung	41	MA Assalaam Kranggan
14	SMA N 3 Temanggung	42	MAN Temanggung
15	SMA Nur Lintang Kedu	43	MAS Al Huda
16	SMA PGRI Temanggung	44	MAS Al Mu'min Muhammadiyah
17	SMK 17 Parakan	45	MAS Darul Falah Pringsurat
18	SMK 17 Temanggung	46	MAS Darul Muttaqin
19	SMK Al Mumin Muhammadiyah	47	MAS D-Baito Sunan Plumbon
20	SMK Anwarus Solichin Kranggan	48	MAS Hidayatullah
21	SMK Bhumi Phala Parakan	49	MAS Ma'Arif Darul Aman
22	SMK Darul Falach Candiroto	50	MAS Ma'Arif Gemawang
23	SMK DR Sutomo Temanggung	51	MAS Miftahul Huda
24	SMK Eyzzul Moslem Bulu	52	MAS Mu'allimin Kandangan
25	SMK Ganesa Satria 4 Kedu	53	MAS Mu'allimin Parakan
26	SMK HKTl Temanggung	54	MAS Mu'allimin Temanggung
27	SMK Jenderal Bambang Sugeng	55	MAS PP Darul Falach Candiroto
28	SMK Muhammadiyah Ngadirejo	56	MAS Safinatul Jabal

Pada bulan Juni 2023 (triwulan II) dilaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila kepada siswa-siswi di

16 sekolah. Akan tetapi karena sekolah yang diberikan sosialisasi ada diantara daftar SMA yang telah mendapat sosialisasi sebelumnya maka jumlahnya tidak menambah capaian indikator kinerja.

1	SMA N 1 Temanggung	9	SMK N 1 Temanggung
2	SMA N 2 Temanggung	10	MAS Darul Muttaqien
3	SMA N 3 Temanggung	11	SMK N 2 Temanggung
4	SMK N Bansari	12	MAS Hidayatullah Pringsurat
5	SMA N 1 Pringsurat	13	SMK N Tembarak
6	SMA N 1 Parakan	14	SMA PGRI Temanggung
7	SMA Kristen Shekinah Temanggung	15	SMK Bhumi Phala Parakan
8	SMK Swadaya Temanggung	16	SMAN 1 Candirototo

Pada triwulan III sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi pendidikan politik di 5 SMA yaitu :

1. SMA 1 Temanggung (17 Juli 2023)
2. SMA 2 Temanggung (21 Juli 2023)
3. SMA 3 Temanggung (24 Juli 2023)
4. MAN Temanggung (25 Juli 2023)
5. SMA 1 Pringsurat (24 Juli 2023)

Pada triwulan IV pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:

1. 25 Oktober 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran Anggota Paskibraka Tahun 2023 Kab Temanggung
2. 30 November 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran siswa-siswi SMA se Kab Temanggung

Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pada TW IV tidak menambah capaian indikator kinerja program, karena sebelumnya nama sekolah tersebut telah mendapatkan sosialisasi dan telah dihitung dalam capaian indikator kinerja program.

Presentase sekolah yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan adalah sebesar 70%, telah mencapai target kinerja pembangunan dengan status Telah Tercapai / TT.

Faktor pendorong tercapainya persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang

dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada elemen masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Adapun untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2018 s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	23	3	0	14	169	230
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	7,95	1,03	0	4,8	58,48	79,58

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan III, pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan telah dilakukan di 48 desa / kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Banyurip
2. Kelurahan Madureso
3. 19 kelurahan dan 6 desa di Kecamatan Temanggung
4. Kelurahan Sidorejo
5. Desa Soropadan
6. 19 desa di Kecamatan Bulu (13 Juli 2023 bertempat di Desa Dukuhseman Wonosari Bulu)

Pada triwulan IV pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:

1. 12 Oktober 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran organisasi masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Temanggung
 2. 5 dan 6 Desember 2023 di Omah Kebon dengan sasaran 180 desa di 20 Kecamatan.
 3. 14 Desember 2023 di Balai Desa Candisari Tlogomulyo dengan sasaran warga masyarakat desa di Kecamatan Tlogomulyo
- Capaian di tahun 2023 untuk cakupan desa/ kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan adalah sebesar 79,58% dari target sebesar 10%. Sampai dengan triwulan IV berstatus telah tercapai (TT).

Faktor pendorong tercapainya persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

5. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. Untuk menghitungnya digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG Tahun 2018 s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemilih yg hadir di TPS	485.608	529.859	529.859	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	607.598	607.598	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu/KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Th 2021

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Keterwakilan perempuan di lembaga politik adalah jumlah perempuan yang berperan serta aktif di lembaga Politik.

Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

Untuk mengetahui persentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2018 sd triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengurus partai politik Perempuan	88	98	98	98	91	91
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	392	392	392	278	278
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	22,68	25	25	25	32,73	32,73

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2023

Jumlah perempuan yang menjadi pengurus partai politik yang mempunyai wakil di DPRD hasil pemilu 2019 sbb :

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	PDIP	12	7	19
2	PKB	19	8	27
3	Golkar	57	13	70
4	Gerindra	10	7	17
5	PAN	15	10	25
6	PPP	17	8	25
7	PKS	6	4	10
8	Hanura	14	10	24
9	Nasdem	15	12	27
10	Demokrat	22	12	34
	TOTAL	187	91	278

Sumber Bidang Politik dan Ormas Bankesbangpol 2023

Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian perempuan yang menjadi pengurus di partai politik adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD

Yang dimaksud dengan Keterwakilan Perempuan di DPRD adalah Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung hasil Pemilu 2019 untuk masa bakti Periode 2019-2024.

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD Th 2018 s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	15	15	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD	31%	33%	33%	33%	33%	33%

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019-2024 sebanyak 15 orang dari total anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc	PDIP
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA

10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si	PKB
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian ini adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%. Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2018 s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	20	20
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kecamatan hanya dilakukan 1 kali di masing-masing kecamatan pada tahun 2022 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 tetap 100%. Kegiatan FKUB di kecamatan pada tahun 2023 adalah melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil saat pembentukan tahun 2022.

Faktor pendukung presentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi merupakan sebuah kegiatan dalam rangka untuk mendeteksi dan menangani konflik di bidang seni, budaya, agama kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung. (Sumber Bidang Kesbang)

Untuk memperoleh prosentase terdektesi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi digunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, di kali 100 % Prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2018 s.d TW IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah konflik yang tertangani	40	5	2	1	0	8
2	Jumlah keseluruhan konflik yng dilaporkan	40	5	2	1	0	8
3	Prosentase konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Pada awal tahun 2023 terdapat konflik pendirian pesantren di wilayah Kecamatan Temanggung. Konflik tersebut dapat tertangani dan terselesaikan melalui mediasi. Kemudian pada triwulan 2 muncul 4 konflik dan dapat tertangani yaitu :

1. Pengamanan pelajar di daerah Soropadan terkait tawuran di wilayah Kabupaten Magelang (April 2023)
2. Aksi Damai APTI di Gedung DPRD (Mei 2023)
3. Aksi mogok kerja PT Tirta Mas (Mei 2023)
4. Aksi karyawan SJI (Mei 2023)
5. Sita Eksekusi kantor advokat (6 Juli 2023)
6. Unjuk rasa di SMK Ganesha Kedu (4 Juli 2023)
7. Audensi warga Dusun Condong Kedu (17 Juli 2023)
8. Unjuk rasa serikat pekerja dan serikat buruh di PT SJI (14

Sept 2023)

Prosentase tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi di Tahun 2023 sebesar 100% .

Faktor pendukung Prosentase tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi adalah adanya tim untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

10. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani digunakan rumus: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Adapun prosentase konflik yang telah tertangani dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Persentase Terdeteksi &Tertangani Konflik Politik dan Keamanan Daerah Kab Temanggung Tahun 2018 s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah konflik poltik dan keamanan daerah yang tertangani	5	2	1	0	0	0
2	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan	5	2	1	0	0	0
3	Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab.Temanggung, 2023

Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2023. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2023 triwulan IV adalah 100%.

Faktor pendukung Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani adalah adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

11. PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yakni berupa sosialisasi/pembinaan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di desa dan kelurahan di Kab Temanggung.

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilihat pada tabel dibawah:

Presentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba s.d Triwulan IV 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	10	1	183	106	32	230
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,34	0,35	63,32	36,68	11,1	79,58

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Di tahun 2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2022 sosialisasi Pencegahan Narkoba dilaksanakan, pada tanggal 1 April 2022 dengan kegiatan Deklarasi Anti Narkoba kepada seluruh jajaran Kepala Desa di Kabupaten Temanggung. Kemudian pada TW 2, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Ngropoh Kranggan dan Menggoro Tembarak.

Pada tahun 2023 Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di 29 desa / kelurahan sbb :

1. Kelurahan Banyurip
2. Kelurahan Madureso

3. 19 kelurahan dan 6 desa di Kecamatan Temanggung
4. Kelurahan Sidorejo
5. Desa Soropadan
6. 19 desa di Kecamatan Bulu (13 Juli 2023 bertempat di Desa Dukuhseman Wonosari Bulu)

Pada triwulan IV pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:

1. 12 Oktober 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran organisasi masyarakat yang terdaftar di Kabupaten Temanggung
2. 5 dan 6 Desember 2023 di Omah Kebon dengan sasaran 180 desa di 20 Kecamatan.
3. 14 Desember 2023 di Balai Desa Candisari Tlogomulyo dengan sasaran warga masyarakat desa di Kecamatan Tlogomulyo

Sampai dengan triwulan IV 2023 presentase desa/ kelurahan yang mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah 79,58 % dengan status capaian Telah Tercapai (TT).

Faktor pendukung tercapainya presentase desa/ kelurahan yang mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Merupakan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung. Jumlah Sekolah yang menjadi target pembinaan adalah 80 Sekolah Menengah.

Untuk menghitung jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah sekolah menengah negeri/swasta yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh sekolah menengah negeri/swasta di Kabupaten Temanggung dikali 100. Jumlah sekolah yang

mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba:

Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun sd TW III 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	101	0	0	0	30	56
2	Jumlah sekolah yang ada	113	80	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	17	0	0	0	38	70

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 pada 56 sekolah di Kabupaten Temanggung dengan daftar sekolah sbb:

1.	SMA Bhakti Karya Kaloran	29	SMK Muh 1 Temanggung
2.	SMA Harapan Bangsa Kaloran	30	SMK Mutiara Mandiri Tmg
3	SMA Islam Kandangan	31	SMK NU Temanggung
4	SMA Islam Sudirman	32	SMK N 1 Temanggung
5	SMA IT Istiqomah Tembarak	33	SMK N 2 Temanggung
6	SMA Kristen Shekinah	34	SMK N Bansari
7	SMA Miftakhul Mubtadin Montessori Kaloran	35	SMK N Jumo
8	SMA Muhammadiyah 1 Tmg	36	SMK N Pringsurat
9	SMA N 1 Candiroto	37	SMK N Tembarak
10	SMA N 1 Parakan	38	SMK PGRI Kedu
11	SMA N 1 Pringsurat	39	SMK Swadaya
12	SMA N 1 Temanggung	40	MA Al Maliki Temanggung
13	SMA N 2 Temanggung	41	MA Assalaam Kranggan
14	SMA N 3 Temanggung	42	MAN Temanggung
15	SMA Nur Lintang Kedu	43	MAS Al Huda
16	SMA PGRI Temanggung	44	MAS Al Mu'min Muhammadiyah
17	SMK 17 Parakan	45	MAS Darul Falah Pringsurat
18	SMK 17 Temanggung	46	MAS Darul Muttaqin Selopampang
19	SMK Al Mumin Muhammadiyah Tembarak	47	MAS D-Baito Sunan Plumbon
20	SMK Anwarus Solichin Kranggan	48	MAS Hidayatullah
21	SMK Bhumi Phala Parakan	49	MAS Ma'Arif Darul Aman
22	SMK Darul Falach Candiroto	50	MAS Ma'Arif Gemawang
23	SMK DR Sutomo Temanggung	51	MAS Miftahul Huda

24	SMK Ezzul Moslem Bulu	52	MAS Mu'allimin Kandangan
25	SMK Ganesa Satria 4 Kedu	53	MAS Mu'allimin Parakan
26	SMK HKTI Temanggung	54	MAS Mu'allimin Temanggung
27	SMK Jenderal Bambang Sugeng	55	MAS PP Darul Falach Candirot
28	SMK Muhammadiyah Ngadirejo	56	MAS Safinatul Jabal

Pada bulan Juni 2023 dilaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila kepada siswa-siswi di 16 sekolah. Akan tetapi karena sekolah yang diberikan sosialisasi ada diantara daftar SMA yang telah mendapat sosialisasi sebelumnya maka jumlahnya tidak menambah capaian indikator kinerja.

1	SMA N 1 Temanggung	9	SMK N 1 Temanggung
2	SMA N 2 Temanggung	10	MAS Darul Muttaqien
3	SMA N 3 Temanggung	11	SMK N 2 Temanggung
4	SMK N Bansari	12	MAS Hidayatullah *ringsurat
5	SMA N 1 Pringsurat	13	SMK N Tembarak
6	SMA N 1 Parakan	14	SMA PGRI Temanggung
7	SMA Kristen Shekinah	15	SMK Bhumi Phala Parakan
8	SMK Swadaya Temanggung	16	SMAN 1 Candirot

Pada triwulan III sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi pendidikan politik di 5 SMA yaitu :

1. SMA 1 Temanggung (17 Juli 2023)
2. SMA 2 Temanggung (21 Juli 2023)
3. SMA 3 Temanggung (24 Juli 2023)
4. MAN Temanggung (25 Juli 2023)
5. SMA 1 Pringsurat (24 Juli 2023)

Pada triwulan IV pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:

1. 25 Oktober 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran Anggota Paskibraka Tahun 2023 Kab Temanggung
2. 30 November 2023 di Aula Badan Kesbangpol dengan sasaran siswa-siswi SMA se Kab Temanggung

Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pada TW IV tidak menambah capaian indikator kinerja program, karena sebelumnya nama sekolah tersebut telah mendapatkan sosialisasi dan telah dihitung dalam capaian indikator kinerja program.

Presentase sekolah yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba adalah sebesar 70%, telah mencapai target kinerja pembangunan

dengan status Telah Tercapai / TT.

Faktor pendukung tercapainya sekolah yang mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

4.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator, semua indikator telah mencapai target 100 %.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
 - Ada 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak mendapat anggaran pada DPA tahun 2024 sehingga menghambat pencapaian tugas dan fungsi Kesbangpol yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah

- Minimnya sarana prasarana pegawai (meja, kursi, alat kantor lainnya)
- Tidak ada ruang pertemuan yang layak karena selama ini menggunakan garasi kendaraan

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Memunculkan kembali kegiatan yang tidak ada di DPA sebagai dana stimulant untuk mendukung kegiatan tersebut
- Menganggarkan untuk penambahan sarpras kantor

4.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteran gan
						7.830.966.235							7.679.911.220	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
8.01.02. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						8.01.02.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
8.01.02. 2.01.00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggung	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	dokume n	275.000.000	8.01.02.2 .01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggu ng	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	dokume n	75.000.000	
8.01.02. 2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53	orang	650.000.000	8.01.02.2 .01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Temanggu ng	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	53	orang	625.000.000	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan						8.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala						

	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
8.01.03. 2.01.00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2	dokumen	1.549.650.350
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
8.01.04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
8.01.04. 2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			75.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
8.01.05. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
8.01.05. 2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			220.000.000

	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
8.01.03.2 .01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2	dokumen	1.528.595.335
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
8.01.04.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
8.01.04.2 .01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			20.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
8.01.05.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
8.01.05.2 .01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			135.000.000

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
8.01.06.2.01.00.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			584.000.000
8.01.06.2.01.00.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			10.000.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung				4.062.140.885
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
8.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10.000.000,00

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			574.000.000
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			5.000.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung				4.062.140.885
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			250.000.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10.000.000

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		31.675.000,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20.000.000,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.000.000,00
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		18.000.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.000.000,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30.910.400,00
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.000.000,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		178.089.600,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40.000.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6.000.000,00
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.500.000,00

8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		31.675.000
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20.000.000
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.000.000
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		18.000.000
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30.910.400
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.000.000
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		178.089.600
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40.000.000
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6.000.000
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.500.000

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

4.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
NIHIL					

4.5 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Monev LPJ Bantuan keuangan partai politik	Badan Kesbangpol, Parpol	APBD	Monitoring ke parpol penerima hibah untuk mengantisipasi kendala yang timbul dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban	LPJ Banpol	Laporan pertanggungjawaban banpol sesuai dan selesai tepat waktu	2021- saat ini
2	Temanning bergerak melawan narkoba	Kesbangpol, BNN, PKK	APBD	Pembentukan dan pengukuhan relawan perempuan anti narkoba	Peningkatan peran perempuan (ibu) dalam keluarga untuk mencegah narkoba	Ketahanan keluarga akan membentuk keluarga sejahtera yang bebas dari narkoba	2024

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Belum ada penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

Commented [16]: Belum ada, kl misalnya tidak ada ditulis NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Commented [17]: Disesuaikan sistimatikanya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya toleransi masyarakat						
	Menurunnya konflik di masyarakat					
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	90	100
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	prosentase pelaksanaan pendidikan politik	%	90	100
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	13,33
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.062.140.885	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.140.885	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.675.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.675.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.675.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.675.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.089.600	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	
B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000	B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	625.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	625.000.000	
C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.528.595.335	C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.528.595.335	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.595.335		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.528.595.335	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.528.595.335		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.528.595.335	
D	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20.000.000	D	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20.000.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000	
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	135.000.000	E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	135.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	135.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	135.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	135.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	135.000.000	
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	579.000.000	F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	579.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	579.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	579.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	574.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	574.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000.000	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7.679.911.220,00							9.287.293.385,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.679.911.220,00							9.287.293.385,00	
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.679.911.220,00							9.287.293.385,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah	-			100 %	4.717.315.885,00						-	4.737.315.885,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan	-			100 %	4.062.140.885,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. refor si birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.062.140.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bul an	4.062.140.885,00	Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. refor si birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.062.140.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	250.000.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. refor si birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				400 Orang	250.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	136.675.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	146.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUBANG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	31.675.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		31.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB NG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang kegiatan perangkat daerah</i>	-			100 %	215.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	215.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.910.400,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.910.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	178.089.600,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		178.089.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	53.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	63.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	40.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	6.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	7.500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Presentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>	80 %			80 %	700.000.000,00						80 %	1.025.000.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	-			2 Dokumen	700.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan	-	1.025.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				53 Orang	625.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	80 %			80 %	1.528.595.335,00						80 %	2.584.977.500,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			1 kegiatan	1.528.595.335,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	-	2.584.977.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	1.528.595.335,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik		2.584.977.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	13,33 %			13,33 %	20.000.000,00						13,33 %	75.000.000,00	

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			1 kegiatan	20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya organisasi masyarakat yang berdaya	-	75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya organisasi masyarakat yang berdaya		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %			100 %	135.000.000,00						100 %	250.000.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			1 kegiatan	135.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				120 orang Orang	135.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah</i>	100 %			100 %	579.000.000,00						100 %	615.000.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	-			2 kegiatan	579.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kondusifitas wilayah	-	615.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				200 Orang	574.000.000,00	Kab. Tembung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kondusifitas wilayah		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

RENJA 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
										NASIONAL					DAERAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				10 Laporan	5.000.000,00	Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. refor si birokrasi melalui pen ingkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kondusifitas wilayah		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH								7.679.911.220,00						9.287.293.385,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasi sebesar 98,75 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar 73,51%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 7.679.911.220,00 yang terbagi untuk pembiayaan bidang kesatuan bangsa, bidang politik dan organisasi masyarakat dan kesekretariatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 1 Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002